

OBJEKTIVITAS KONFLIK AMBON PADA PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIKA

Sumartono

Dosen FIKOM Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
sumartono@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Secara normatif pers dalam meliput suatu berita harus bersikap netral. Namun dalam prakteknya wartawan dalam tugas mencari dan meliput berita sulit melepaskan diri dari ikatan emosional dan primordialisme. Pada pemberitaan di surat kabar Kompas dan Republika mengenai konflik Ambon terlihat bahwa kedua surat kabar ini cukup sulit untuk bertindak objektif dan netral. Kepentingan-kepentingan ideologis dan agama sulit untuk dihindari dan mempengaruhi dalam pemuatan dan penyajian berita di surat kabar Kompas dan Republika

Kata Kunci: Berita, Objektivitas, Konflik

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multi etnis yang memiliki aneka ragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Pada permukaan orang-orang Indonesia tampak bersatu di bawah semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun tidak demikian halnya pada kenyataan. Keanekaragaman dan perbedaan itu merupakan potensi terpendam pemicu konflik.

Pakar studi konflik dari Universitas Oxford, Steward, (Kompas 16/12/03) menyebutkan empat kategori negara yang berpotensi konflik. Keempat kategori adalah negara dengan tingkat pendapatan dan pembangunan manusianya rendah, negara yang pernah terlibat konflik serius dalam 30 tahun sebelumnya, negara dengan tingkat keanekaragaman suku, budaya yang tinggi, dan negara yang rezim politiknya berada dalam transisi rezim represif menuju rezim demokratis. Indonesia bisa masuk dalam keempat kategori tersebut sekaligus.

Tinjauan Teori

Pada era Orde Baru, tuntutan kemajemukan rakyat Indonesia dicoba disatukan dengan memanfaatkan media massa. Untuk menyatukan kemajemukan rakyat Indonesia ini media massa berperan sebagai salah satu pilar terbentuknya negara demokratis dan masyarakat madani. Media massa menjadi wadah perbedaan pendapat yang sehat; tidak bertendensi memojokkan kelompok yang berseberangan dengan dirinya (Sudibyo, *et al.* 2001).

Dalam kungkungan rezim Orde Baru, media massa dipaksa untuk berhati-hati dalam pemberitaan atas kasus-kasus yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Wacana tentang etnis, ras dan agama selama ini menjadi hal yang selalu ditutup-tutupi dan tabu di kalangan masyarakat. Namun seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru, berubah pula tatanan institusi media.

Di era Reformasi, kebebasan pers telah menghadirkan dengan jelas

kekacauan yang selama era Orde Baru selalu ditutup-tutupi. Pemberitaan media atas sejumlah isu memperlihatkan munculnya keberanian dan kejujuran dalam menentukan sikap. Pada Era Reformasi krisis, dan konflik menjadi lebih tajam dan tampak semakin dramatis diberitakan melalui liputan pers. Konflik Ambon dan Maluku Utara yang bernuansa agama memperlihatkan dengan jelas sikap dan posisi yang diambil oleh media massa tertentu dalam pemberitaannya.

Dibandingkan dengan topik-topik lain, para wartawan menganggap krisis, konflik, dan perang sebagai hal yang memenuhi banyak kriteria jurnalistik untuk membuat peristiwa menjadi berita. Karena menarik perhatian tentu saja peristiwa konflik tidak akan luput dari perhatian dan pemberitaan media massa. Di antara berbagai macam media massa yang menyiarkan berita mengenai konflik bernuansa agama adalah surat kabar Kompas dan surat kabar Republika. Kompas dikenal sebagai surat kabar yang membawa aspirasi dan suara umat Katolik, sedangkan surat kabar Republika banyak dikenal masyarakat sebagai medianya umat Islam (Eriyanto, 2003).

Pemberitaan media mengenai konflik dapat membawa pengaruh pada dua hal. Pertama pemberitaan media justru memperluas eskalasi konflik. Kedua, pemberitaan media mengenai konflik dianggap sebagai wacana yang dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik (Siebert, *et al.* 1986)

Mencermati kedua kemungkinan tersebut tampaknya kemungkinan pertama lebih terbuka terjadi melalui pemberitaan suatu konflik oleh media massa (Ritonga dan Iskandar, 2002). Apalagi kondisi

masyarakat Indonesia yang masih sangat heterogen mulai dari suku, agama, dan bahasanya. Fenomena ini dapat dicermati pada konflik Ambon, yang semula hanya terjadi di Pulau Ambon. Perkembangan berikutnya konflik meluas hingga ke Kepulauan Maluku. Perluasan konflik yang awalnya merupakan masalah lokal kemudian meluas menjadi isu nasional.

Secara umum, konflik Ambon berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002. Selama empat tahun konflik Ambon, tidak terjadi terus menerus. Ada Kalanya berhenti, disertai dengan perjanjian dan perdamaian, lalu kembali muncul. Konflik Ambon yang berlangsung selama empat tahun itu banyak menimbulkan kerugian, kerusakan dan kehancuran fisik dan tatanan sosial yang selama ini terbina dengan baik. Kerusakan itu menghancurkan ikatan persaudaraan yang selama ini dibangun melalui adat *pela gandong*.

Sebagian masyarakat menilai berbagai kerusakan yang terjadi di Ambon acapkali dilihat sebagai akibat pemberitaan media. Misalnya, Pusat Penanggulangan Krisis Persatuan Gereja Indonesia (PGI) pernah memprotes pemberitaan media. Menurut PGI (Eriyanto, 2003) pemberitaan media memutarbalikkan fakta dan penuh dengan kebohongan. Berita media menyebutkan ada warga Rinjani yang beragama Islam tertembak di dalam masjid oleh warga Ahuru yang beragama Kristen. Padahal, menurut PGI yang terjadi adalah korban sudah meninggal oleh tembakan aparat keamanan lalu dibawa oleh warga ke dalam masjid. Akibat kesalahan pemberitaan ini, terutama oleh media yang terbit di Jakarta menimbulkan kemarahan warga Ambon dan menyulut konflik menjadi besar.

Menurut McQuail (1989) media secara normatif harus bersikap netral. Berita di media massa adalah cermin realitas sosial yang merupakan refleksi dari kehidupan sosial. Namun, penyajian realitas oleh para komunikator media massa melalui berita dengan berbagai alasan teknis, ekonomis ataupun ideologis sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realitas sesungguhnya. Dalam hal ini tugas wartawan menurut Muis (1999) adalah berupaya menemukan akurasi, di atas segala-galanya, dan menyajikan kepada pembaca-pembacanya. Kewajiban lainnya adalah mengutamakan kejujuran atau keterbukaan (*fairness*), berupaya menjauhi sikap berpihak atau berat sebelah dengan cara memberi tempat kepada pihak-pihak yang saling menentang untuk menengahkan pendapat mereka melalui surat kabar. Selain itu pers juga harus objektif dan akurat dalam membuat pemberitaan

Tinjauan Pustaka Berita Konflik

Berita menurut Djuroto (2000) berasal dari bahasa sansekerta, *vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebutkan dengan *vritta*, artinya kejadian atau telah terjadi. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian berita adalah: 1) cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar; 2) laporan 3) pemberitahuan; pengumuman.

Gil (1993) mengemukakan pengertian berita sebagai laporan tentang sesuatu yang menarik perhatian orang. Pihak yang menentukan

apa yang menarik perhatian pembaca adalah tim redaksi berita

Berita bukan apa yang disepakati seluruh wartawan melainkan apa yang disiarkan para pemegang fungsi utama pers, yaitu “penjaga gawang” seperti reporter yang berpengaruh, editor berita, dan editor kawat. Berita menurut Nimmo (1989), adalah apa yang dikatakan, dilakukan, dan dijual wartawan dalam kerangka pembatasan institusional, ekonomi, teknologis, sosial dan psikologis.

Untuk membuat berita, menurut Djuroto (2000) paling tidak harus memenuhi dua syarat yaitu 1) faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga akurasi tinggal sebagian saja, 2) berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap. Dalam menulis berita dikenal semboyan “satu masalah dalam satu berita”. Artinya satu berita harus dikupas dari satu masalah saja (*monofacta*) dan bukan banyak masalah (*multifacta*) karena akan menimbulkan kesukaran penafsiran yang menyebabkan berita menjadi tidak sempurna

Konflik menurut Fisher (2001) adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Dari pengertian diatas yang dimaksud dengan berita konflik dalam penelitian ini adalah laporan tentang fakta, peristiwa mengenai dua pihak atau lebih, baik individu ataupun kelompok yang tidak sejalan atau saling bertentangan yang terpilih oleh staf redaksi untuk disiarkan karena dapat menarik perhatian khalayak. Berita konflik dalam konteks penelitian ini adalah peristiwa konflik yang terjadi di daerah Ambon.

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai fase aktivitas, inten-

sitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Fase-fase konflik terdiri dari (Fisher, 2001). Pertama, prakonflik; merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Dua, konfrontasi; pada fase ini konflik menjadi semakin terbuka. Hubungan di antara kedua pihak menjadi sangat tegang, mengarah pada polarisasi di antara para pendukung di masing-masing pihak. Tiga, krisis; ini merupakan puncak krisis, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya. Empat, akibat; pada fase ini, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada fase ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Lima, pascakonflik; situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua pihak.

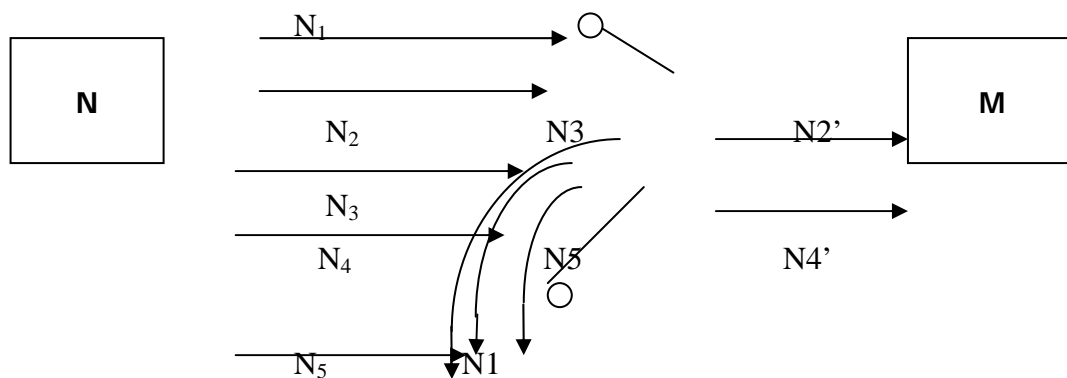
Namun jika isu-isu dan masalah-masalah penyebab pertentangan antara dua pihak tidak diatasi dengan baik, fase ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Pembahasan

Proses Pengolahan Berita

Berita di media massa sebelum dipublikasikan akan melalui beberapa fase pemrosesan berita. Dengan menggunakan, memahami konsep *gatekeeper* kita dapat memahami bagaimana cara kerja komunikasi massa. Seorang *gatekeeper* (Moss dan Tubs, 1996) adalah orang yang memilih, mengubah dan menolak pesan dapat mempengaruhi aliran informasi kepada seseorang atau sekelompok penerima.

Menurut White (McQuail, 1993) dalam sebuah studi tentang editor berita telegram pada sebuah surat kabar Amerika, yang dalam pekerjaan memilih berita dianggap sebagai kegiatan *gatekeeper*. Model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber: McQuail, 1993

Gambar 1
Model *Gatekeeper* dalam Proses Pengolahan Berita

| | |
|---|--------------------------------|
| Keterangan | |
| N | = Sumber Berita |
| N ₁ ; N ₂ ; ...N _x | = Berita yg diperoleh wartawan |
| N ₁ ; N ₅ ; N ₃ | =Berita yg tidak terseleksi |
| N ₂ '; N ₄ ' | =Berita yg dipublikasikan |
| M | = Massa |

Menurut Bitner (dalam Moss dan Tubs, 1996), keputusan *gatekeeper* mengenai informasi mana yang harus dipilih dan ditolak dipengaruhi oleh banyak variabel antara lain: ekonomi, pembatasan legal, batas waktu (*deadline*), etika, kompetisi, nilai berita, dan reaksi terhadap umpan balik.

Hal-hal tersebut merupakan sebagian dari pertimbangan-pertimbangan yang menentukan berita-berita yang akan dibuang dan berita mana yang akan dipilih, disunting dan dipublikasikan kepada khalayak sasaran media massa.

Objektifitas Berita

Objektifitas berasal dari kata objek menurut KBBI adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sedangkan menurut Assegaf (1983), objektifitas (*objectivity*) adalah menceritakan keadaan yang sebenarnya dan bagaimana kejadian yang akan dituliskan itu berlangsung

Objektifitas berita menurut Djuroto (2000), artinya penulis berita hanya menyiarkan berita apa adanya. Jika materi berita itu berasal dari dua pihak yang berlawanan, harus dijaga keseimbangan informasi dari kedua belah pihak yang berlawanan. Penulis berita tidak memberi kesimpulan atas dasar pendapatnya sendiri. Dalam menulis berita, penulis berita harus

membedakan antara fakta, interpretasi, dan opini.

Menurut Merril (1984) objektifitas berita dapat dicapai dengan tiga cara. Pertama pemisahan fakta dari pendapat. Kedua, menyajikan pandangan terhadap berita tanpa disertai dimensi emosional. Ketiga, memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjawab dengan cara memberikan banyak informasi pada masyarakat

Dua komponen objektifitas yang harus dipertimbangan seperti dirumuskan Westerstahl (Mc Quail, 1989) mencakup faktor faktualitas dan faktor impartialitas. Faktualitas dikaitkan dengan bentuk penyajian laporan tentang peristiwa atau pernyataan yang dapat dicek akurasi pada sumber dan disajikan tanpa komentar. Impartialitas dihubungkan dengan sikap netral wartawan (reporter), suatu sikap yang menjauhkan penilaian pribadi (personal) dan subjektif demi pencapaian sasaran yang diinginkan.

Faktualitas

Kefaktualan berita ditentukan oleh beberapa kriteria akurasi antara lain ketuhan laporan, ketepatan yang ditopang oleh pertimbangan independen, dan tidak adanya keinginan untuk menyalaharakan atau menekan. (McQuail; 1989) Pers juga dituntut melakukan pemberitaan yang akurat yang tidak boleh berbohong, menyatakan fakta sebagai fakta dan pendapat sebagai pendapat (Siebert *et al.*, 1986)

Seorang pembuat berita harus menjaga objektifitas dalam pemberitaannya. Artinya penulis berita hanya menyiarkan berita apa adanya. Penulis berita tidak memberi kesimpulan atas dasar pendapatnya sendiri. Dalam menulis berita, penulis harus membe-

dakan antara fakta, interpretasi dan opini (Djuroto; 2000)

Impartialitas

Menurut Sudibyo (2001) Impartialitas adalah sikap netral dalam penyajian dan seimbang dalam penyajian fakta antara yang pro dan kontra. Keseimbangan juga berkaitan dengan pemberian waktu, ruang, dan penekanan yang proporsional oleh media

Salah satu syarat objektivitas berita yang lebih populer dikenal dengan istilah pemberitaan dua sisi (*cover both story*), dimana pers menyajikan semua pihak yang terlibat (Siebert *et al.*, 1986)

Menurut Djuroto (2000) jika materi berita itu berasal dari dua pihak yang berlawanan, harus dijaga keseimbangan informasi dari kedua belah pihak yang berlawanan tersebut.

Surat Kabar Kompas

Surat kabar Kompas dibangun pada tahun 1965 oleh Jacob Oetama sebagai prakarsa partai katolik dalam usaha mempresentasikan suara mereka pada kancah perpolitikan tahun 1960-an.

Ciri kepartaian muncul secara dominan pada Kompas sebagaimana surat kabar partai lain pada masa itu. Kompas dengan demikian menjadi juru bicara partai, meskipun dengan cara yang cukup halus. Pembaca dapat menjumpai pengumuman-pengumuman dari partai katolik, organisasi-organisasi katolik, juga universitas katolik.

Kedekatan Kompas dengan Partai Katolik berlanjut sampai pada tahun 1971. Saat itu hubungan antara surat kabar dengan partai politik meningkat, sementara pemerintah berusaha memperkecil primordialisme.

Dua tahun kemudian, pemerintah mengikis partai-partai politik dengan memaksa mereka (kecuali golongan Karya) melebur menjadi dua partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Akibat dari restrukturisasi ini, hubungan antara Kompas dan Partai Katolik semakin longgar sampai akhirnya kini Kompas menjadi institusi bisnis yang profesional dan beorientasi bisnis.

Saat ini Kompas mendirikan dirinya sebagai koran independen, dan lebih berorientasi bisnis. Visi surat kabar Kompas adalah berpartisipasi dalam membangun masyarakat Indonesia baru, yaitu masyarakat dengan kemanusiaan transendental, persatuan dalam perbedaan, menghormati individu dan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan misi surat kabar Kompas adalah menjadi nomor satu dalam semua aspek usaha, diantara usaha-usaha lain yang sejenis dan dalam kelas yang sama. Meskipun demikian latar belakangnya sebagai koran yang dekat dengan kekuatan katolik mempengaruhi posisi Kompas dalam berbagai perdebatan politik, terutama bila perdebatan itu menyangkut atau menyinggung kekuatan politik Islam.

Surat Kabar Republika

Republika hadir dalam kancah pers nasional dengan latar belakang sosial politik yang sangat penting. Republika dilihat sebagai satu titik yang menandai kebangkitan politik Islam tahun 1990-an. Nama Republika sendiri berasal dari ide (mantan) Presiden Soeharto yang disampainya saat beberapa pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat menghadap untuk

melaporkan rencana peluncuran harian umum tersebut

Republika dibangun ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa yang dikepalai Menteri Riset dan Teknologi BJ. Habibie sekaligus pemilik PT. Abdi Bangsa. Dengan dukungan ICMI, Surat Izin Penerbitan Usaha Pers gampang diraih.

Manajemen awal Republika mencoba meretas persoalan klasik: Bagaimana mengedepankan misi Islam dalam sebuah negara. Dalam konteks jurnalisme, bagaimana menerpakan kaidah pemberitaan yang profesional tanpa meninggalkan misi keIslamannya.

Republika tidak hanya ditujukan untuk mendukung partai politik atau untuk orang Islam yang saleh saja, tetapi untuk orang-orang yang belum mantap imannya dan enggan dengan seruan moralistik. Republika secara teratur memuat artikel-artikel mengenai seni, televisi, sastra dan trend mode yang menarik bagi Muslim kelas menengah dan atas yang menjadi pembacanya. Republika adalah suatu upaya untuk menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar persoalan untuk orang desa dan ulama, tetapi sebuah agama yang bisa mengilhami suatu kesadaran sosial yang sesuai dengan aspirasi rakyat sebagai keterbukaan, dan pluralisme.

Kajian pada Topik-topik Konflik Ambon

Berdasarkan hasil penelitian/tesis Sumartono mengenai topik-topik yang ada selama lima fase konflik Ambon pada surat kabar Kompas dan Republika terlihat ada perbedaan sudut pandang. Fase satu konflik Ambon dimulai dari perkelahian antar warga pemuda kampung Batumerah dengan Mardika. Konflik ini menjalar

dan membesar menjadi keributan antar warga beda agama dan adanya pembakaran rumah ibadah.

Sikap redaksi surat kabar Kompas dan Republika dalam memberitakan peristiwa ini terlihat berbeda. Secara umum surat kabar Kompas pada fase pertama terlihat lebih hati-hati dalam memberitakan konflik Ambon sedangkan surat kabar Republika terlihat lebih emosional.

Judul-judul berita pada fase satu konflik Ambon misalnya, pada tanggal 21/01/99 surat kabar Kompas mengangkat judul berita “Kota Ambon Diguncang Keributan Antar Warga”, sedangkan pada hari yang sama Republika mengangkat judul “Sedikitnya 10 Tewas Dalam Kerusuhan Ambon”. Pada tanggal 21/01/99 surat kabar Republika pada judul berita menekankan pada jumlah korban. Tanggal 19/02/99 surat kabar Kompas pada judul “Rehabilitasi Ambon Dimulai” lebih pada upaya perdamaian, sedangkan pada judul “Ambon Kembali Diguncang Bom” pada surat kabar Republika, kerusuhan di Ambon masih berlangsung dan berlanjut. Tanggal 14/03/99 judul berita “Konflik Ambon Mereda” surat kabar Kompas memberitakan bahwa konflik di Ambon sudah mereda, sedangkan pada judul “Luka Ambon Luka Kita”, memberitakan sikap dan rasa simpati redaksi Republika pada penderitaan umat Islam di Ambon.

Pada fase dua konflik Ambon mulai terjadi pemisahan dan perpecahan antara warga Kristen dan Islam. Judul-judul berita di surat kabar Kompas pada fase dua isi berita banyak mengkritik, namun disampaikan secara tidak langsung, misalnya pada judul “Lemah Peran Intelijen Ambon” (Kompas, 06/10/99), dan Kompas tanggal 01/12/99 “Makin

Jelas Keberpihakkan Aparat Di Ambon”. Sikap simpati terlihat pada penderitaan dan perjuangan umat Islam di Ambon terlihat pada pemberitaan surat kabar Republika, misalnya pada tanggal 06/10/99, judul berita di Republika adalah “Dua Masjid Di Ambon Dibakar” dan tiga judul berita pada tanggal 01/12/99.

Pada fase tiga, situasi kota Ambon relatif tenang selama empat bulan pertama. Namun memasuki bulan kelima situasi kota Ambon kembali tegang dan pada fase ini kelompok Islam mulai dibantu oleh Laskar Jihad dari Jawa dan kelompok Kristen mulai mengorganisasikan diri ke dalam kelompok kristus.

Judul berita yang menunjukkan adanya pengelompokan berdasarkan sentimen keagamaan terlihat pada pemberitaan di surat kabar Kompas dan Republika. Berita di Kompas berjudul “Galela Terus Mencekam” (14/01/00), secara samar menunjukkan rasa simpati dan prihatin pada umat Kristen di Ambon. Republika, pada hari yang sama membuat judul berita “Allahu Akbar!!! Duka Ambon, Duka Bersama” menunjukkan rasa simpati Republika pada umat Islam di Ambon.

Topik-topik berita di surat kabar Kompas dan republika pada fase empat dan lima lebih banyak menyajikan fakta akibat konflik, himbuan serta harapan kepada para pembaca agar konflik Ambon segera berakhir. Gaya dan format penyampaian fakta, himbuan dan harapan pada berita di surat kabar Kompas dan Republika tetap sama seperti yang dilakukan pada fase satu sampai tiga

Faktualitas

Faktualitas menurut Sudibyo *et al.* (2001) mengacu pada bentuk

laporan peristiwa dan pernyataan yang dapat dicek akurasi pada sumber, dan disajikan tanpa komentar atau setidaknya dipisahkan secara jelas dari berbagai komentar. Kriteria akurasi meliputi kelengkapan informasi, akurasi dan tidak menyalaharakan laporan. Nilai informasi berkaitan dengan seleksi informasi yang signifikan bagi khalayak.

Berdasarkan hasil penelitian ada perbedaan tingkat akurasi, data dan perbedaan jumlah korban di dalam pemberitaan surat kabar Kompas dan Republika. Perbedaan data tersebut antara lain; Kompas menyebutkan jumlah korban tewas sebanyak 11 orang, sedangkan Republika menyebutkan 10 orang, Kompas tidak menyebutkan rumah ibadah yang dibakar, sedangkan Republika menyebut ada empat tempat ibadah yang dibakar.

Perbedaan data jumlah korban tersebut bias terjadi karena waktu peliputan berita antara surat kabar Kompas dan Republika. Karena itu pencantuman waktu pencarian dan penulisan berita hendaknya ditulis di dalam isi berita.

Mengenai manfaat pencantuman tanggal berita, Soehoet (2003) berpendapat tanggal berita ditulis sesudah judul berita. Tanggal berita berguna untuk memberitahukan kepada pembaca, di mana dan tanggal berapa reporter yang bersangkutan menulis beritanya. Manfaat pencantuman tanggal berita Pembaca berhak mengetahuinya, reporter wajib menuliskan yang sebenarnya.

Adanya dateline kita bisa mengetahui kapan wartawan menulis suatu berita dan tanggal berapa berita tersebut dicetak dan dibaca oleh pembaca surat kabar. Misalnya, berita mengenai bom yang meledak di

Ambon pada tanggal 29 Januari 1999 ditulis oleh wartawan pada tanggal yang sama maka *dateline* berita tersebut adalah. 29/09/99 Kadang redaksi media massa menerima dan menulis sebuah berita beberapa hari setelah peristiwa terjadi dan menulis *dateline* sesuai dengan tanggal terjadinya peristiwa (bukan saat menulis berita). Hal ini dilakukan untuk memberi kesan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih baru, masih aktual.

Tindakan mengubah *dateline* ini sebenarnya merupakan suatu penipuan dan berbahaya. Karena selang waktu antara berita tersebut ditulis dan berita tersebut dimuat, banyak kemungkinan yang dapat terjadi misalnya jumlah korban menjadi bertambah dan sebagainya. Jadi nilai kejujuran perlu dipertahankan, walaupun nilai unsur aktualitas menjadi rendah di mata pembaca.

Republika dalam beritanya menyebutkan ada rumah ibadah yang dibakar, sedangkan Kompas tidak memberitakan hal ini. Mengenai tidak adanya pencantuman/data mengenai empat rumah ibadah yang terbakar di surat kabar Kompas bisa disebabkan karena redaksi Kompas lebih berhati-hati dalam memberitakan kerusakan yang menyangkut umat Islam. Sikap hati-hati juga ditunjukkan segan tidak menyebut secara langsung pihak-pihak yang terlibat. Pelaku kerusakan hanya disebut sebagai massa, sekelompok massa, kelompok agama tertentu dan lain-lain tanpa menyebutkan identitas agama yang jelas. Hal ini untuk menyamakan fakta bahwa yang sedang saling berhadapan, bertikai adalah orang Islam dan orang Kristen. Sikap kehati-hatian ini didasarkan atas kesadaran bahwa sebagai media kelompok minoritas, Kompas tidak berani berspekulasi

dengan membuka konfrontasi langsung. Mereka menghindari penyajian berita yang dapat memicu kebencian umat Islam. Dengan kata lain, bentuk kehati-hatian dengan tidak melibatkan terlalu jauh pada konflik yang terjadi ditujukan secara strategis agar Kompas tidak dimusuhi kelompok lain dan ditinggalkan pembacanya.

Mengenai pemisahan fakta dan opini pada lima fase pemberitaan mengenai konflik Ambon di surat kabar, persentase tertinggi secara umum ada pada surat kabar Republika. Ada kecenderungan wartawan/redaksi Republika dalam pemberitaan mengenai konflik Ambon terjebak dalam primordial agama.

Kesulitan wartawan/redaksi Republika melepaskan ikatan primordial agama menurut Sudibyo *et al.* (2001) karena seorang wartawan juga mempunyai sikap, nilai kepercayaan dan orientasi tertentu terhadap politik, agama, ideologi dan aliran dimana semua komponen itu berpengaruh terhadap hasil kerjanya dalam pembuatan berita.

Salah satu sarana untuk mengkomodasi pendapat wartawan, Oetama, J. (1987) mengemukakan bahwa surat kabar telah memberikan ruangan khusus bagi pendapat yang disebut dengan halaman opini atau editorial page. Halaman opini ini terdiri dari 1) Tajuk rencana, 2) Artikel kolom, dan 3) surat pembaca.

Namun dalam perkembangan pers selanjutnya, terjadilah pendekatan bahkan pembauran antara yang disebut fakta dan opini. Untuk memperjelas mana fakta dan mana opini wartawan hendaknya menyebutkan dengan jelas pada pemberitaan mana bagian yang antara fakta/peristiwa dengan pendapat. Hal ini

dapat dilakukan misalkan dengan menggunakan frase, “menurut pendapat . . .”, atau “berdasarkan hasil pengamatan. . .”

Mengenai kesesuaian judul dan isi berita di surat kabar, secara umum judul berita mengenai konflik Ambon di surat kabar Kompas sesuai dengan isi beritanya. Judul berita di surat kabar Republika terlihat cenderung subyektif, emosional dibanding dengan surat kabar Kompas. Kepentingan dan sentimen agama terlihat banyak pengaruhnya pada judul berita di surat kabar Republika. Judul-judul berita yang cenderung subyektif emosional misalnya, “Dua Masjid di Ambon Dibakar (06/10/99)”, “Allahu Akbar!!! Duka Ambon Duka Bersama (14/01/00)”. Isi berita dari judul-judul berita tersebut menceritakan tentang nasib tragis umat Islam Di Maluku. Republika melalui pemberitaannya terlihat bersimpati atas penderitaan umat muslim, dan juga terkesan memprovokasi umat Islam untuk berjihad membela Muslim Maluku. Berita di surat kabar Republika mengenai konflik Ambon terlihat lebih emosional sehingga antara judul dan isi berita ada yang tidak sesuai. Menurut Sudibyo *et al.* (2001) diakui atau tidak setiap media memiliki kepentingan-kepentingan tertentu entah itu ekonomi, politik, ideologis atau apapun namanya. Dalam hal ini pembuatan berita bukan sekedar menyampaikan realitas, tetapi diyakini membungkus satu atau sejumlah kepentingan.

Impartialitas

Impartialitas adalah sikap netral dalam penyajian dan seimbang dalam penyajian fakta antara yang pro dan kontra. Keseimbangan sumber berita pada pemberitaan konflik

Ambon dapat dilihat dari siapa yang dijadikan sumber berita. Orang yang dijadikan sumber berita itu antara lain dari golongan/kelompok pemerintahan dan militer, warga, dan tokoh agama.

Keseimbangan sumber berita pada surat kabar Kompas terlihat sudah memberikan porsi yang seimbang antara sumber berita dari kalangan muslim, dan sumber berita dari kalangan kristen.. Sedangkan surat kabar Republika dalam pemberitaannya lebih banyak mengambil sumber berita dari kalangan muslim.

Dalam usaha menjaga keseimbangan sumber berita pada peristiwa konflik, banyak hambatan yang ditemui wartawan. Mengenai keseimbangan Muis (2000) mengemukakan *fairness doctrine* mengharuskan setiap penulisan berita atau laporan harus dilakukan secara lengkap, adil dan berimbang atau proporsional. Konsep *fairness doctrine* ini menurut Muis (1999) sama dengan ketentuan dan keharusan memberikan porsi pemberitaan yang sama terhadap isu-isu kontroversial dalam masyarakat atau terhadap semua golongan sebagai-mana yang diatur dalam pasal 7 kode etik jurnalistik PWI.

Sikap netralitas pemberitaan dapat dilihat dari isi pemberitaan tidak memihak, tidak membela dan tidak memojokkan atau menjelek-jelekkkan salah satu pihak yang bertikai.

Berdasarkan data yang ada surat kabar Kompas dalam memberitakan konflik Ambon terlihat lebih netral dibandingkan Republika. Dalam memberitakan kerusuhan, konflik yang melibatkan umat Islam surat kabar Kompas menggunakan cara bahasa dan penyajian yang netral dan tidak menunjukkan keberpihakkan

mereka. Kompas tidak menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap kelompok minoritas Kristen. Keberpihakan surat kabar Republika pada kelompok muslim dan sikap netral surat kabar Kompas dalam memberitakan konflik Ambon bisa terlihat dari pemilihan topik dan judul berita.

Judul-judul berita di surat kabar Republika terlihat lebih subyektif dan emosional dibanding judul berita di surat kabar Kompas. Misalnya pemberitaan tanggal 06/10/99, surat kabar Republika mengangkat peristiwa konflik Ambon dengan judul "Dua masjid Di Ambon Dibakar" sedangkan Kompas mengangkat judul "Lemah Peran Intelijen Ambon". Dari judul berita terlihat bahwa surat kabar Republika dalam pemberitaan konflik Ambon cenderung subjektif dan merasa ikut bersimpati terhadap warga muslim di Ambon. Sedangkan surat kabar Kompas lebih mempersoalkan ketidakmampuan pihak intelijen dalam memprediksi dan mengatasi masalah kerusuhan di Ambon. Hal yang sama terlihat pada berita tanggal 14/01/00, surat kabar Republika mengangkat berita konflik Ambon dengan judul "Allahu Akbar!!! Duka Ambon Duka Kita Bersama" sedangkan Kompas mengangkat judul "Galela Terus Mencekam". Sikap netral surat kabar Kompas didasarkan atas kesadaran bahwa kelompok kristen merupakan kelompok minoritas. Kompas sebagai surat kabar berdasarkan latar belakang sejarah berdirinya dikenal sebagai surat kabar yang menyuarakan umat Kristen, harus bersikap hati-hati agar tidak menyinggung perasaan mayoritas umat Islam di Indonesia. Surat kabar Republika dalam memberitakan konflik Ambon terlihat lebih membela

kelompok Islam. Keberpihakan Republika pada kelompok Islam disebabkan wartawan yang meliput peristiwa dan menulis berita beragama Islam. Menurut Sudibyo *et al.* (2001) kepentingan-kepentingan ideologis, agama sering tak terhindarkan dan mempengaruhi pemuatan dan penyajian berita

Sebagai surat kabar yang membawa aspirasi umat Islam dan karena umat Islam merupakan mayoritas masyarakat di Indonesia, Republika dalam memberitakan konflik Ambon lebih banyak berpihak kepada umat Islam

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis isi pada surat kabar Kompas dan Republika serta melakukan pembahasan yang mendalam, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum surat kabar Kompas dalam pemberitaan konflik terlihat lebih hati-hati dan lebih objektif, sedangkan surat kabar Republika dalam pemberitaan mengenai konflik Ambon terlihat lebih emosional.
2. Pada pemberitaan konflik Ambon fase dua surat kabar Kompas lebih banyak melontarkan kritik kepada pemerintah yang disampaikan secara tidak langsung dan pemberitaan surat kabar Republika terlihat lebih menaruh simpati dan memuella kelompok muslim.
3. Pada fase ketiga konflik Ambon berita di surat kabar Kompas dan Republika mulai memperlihatkan adanya sentimen keagamaan. Surat kabar secara tersamar memuella kelompok kristen, sedangkan surat kabar Republika secara terbuka membela kelompok muslim.

4. Pada fase keempat dan lima surat kabar Kompas dan Republika lebih banyak menyajikan fakta akibat konflik, serta himbauan dan harapan agar pihak-pihak yang bertikai di Ambon segera berdamai dan konflik segera berakhir.

Saran

Dalam kegiatan pencarian dan penulisan berita sangat sulit bagi wartawan untuk bertindak objektif dan tidak memihak. Keberpihakkan wartawan pada penulisan berita hendaknya kepada kebenaran dan keadilan didasarkan pada hukum dan undang-undang. Upaya yang dapat dilakukan bagi surat kabar Kompas dan Republika untuk bisa mendekati objektivitas adalah sebagai berikut

1. Lakukan pemeriksaan dan pemeriksaan kembali fakta kepada sumber berita agar akurasi berita lebih terjaga. Kompas hendaknya menyebutkan dari mana data diperoleh (sumber data) dan berita di Republika hendaknya disertai data pendukung seperti kutipan materi UU, dokumen dan gambar-gambar untuk membantu pembaca lebih memahami isi berita. Apalagi dalam tinjauan jurnalistik, dokumen dan gambar dijadikan sebagai alat penjabar berita.
2. Dalam pembuatan berita hendaknya redaksi surat kabar Kompas dan Republika lebih bersikap profesional dengan tidak memasukkan opini pada berita, atau memisahkan secara tegas antara fakta dan opini. Opini wartawan dapat dimasukkan pada tajuk atau dengan menggunakan frasa yang dapat menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah opini wartawan
3. Wartawan/redaksi surat kabar Republika hendaknya dalam pem-

buatan judul tidak bersifat subjektif dan emosional. Isi berita harus disesuaikan dengan judul.

4. Wartawan/redaksi surat kabar Republika lebih memperhatikan pemberian kesempatan yang sama kepada nara sumber yang berbeda pendapat, baik dari sudut pandangnya, dokumen-dokumennya maupun data lainnya seperti gambar. Hal itu selain untuk memenuhi rasa keadilan dalam pemberitaan, juga sebagai komitmen terhadap
5. keseimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Wartawan/redaksi surat kabar Republika dalam penulisan berita konflik hendaknya bersikap netral, tidak membela satu kelompok dan mendiskreditkan kelompok lain. Keberpihakkan pers adalah pada kebenaran, keadilan dan kepentingan umum.

Daftar Pustaka

- Assegaff D.H, "Jurnalistik Masa Kini", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Edisi ke dua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djuroto T, "Manajemen Penerbitan Pers", Remaja RosdaKarya, Bandung, 2000.
- Ecip S, "Dinamika keterbukaan, Kebebasan, dan Tanggung Jawab Komunikasi Massa di Indonesia", Jurnal ISKI, No5/Oktober 2000, Remaja RosdaKarya, Bandung, 2000.

- Eriyanto, "Media dan Konflik Ambon", Kantor Berita Radio 68H, Jakarta, 2003.
- Hamzah A., *et al*, "Delik-Delik Pers di Indonesia", Media Sarana Pers, Jakarta, 1987.
- Hasrullah, "Megawati dalam Tangkapan Pers", LKiS, Jakarta, 2001.
- Hill DT, "*The Press in New Order Indonesia*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ishwara, Luwi, "Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar", Kompas, Jakarta, 2005.
- McQuail D, "Teori Komunikasi Massa", (Terjemahan A. Dharma. dan A. Ram), Erlangga, Jakarta, 1989.
- McQuail D., dan Windahl S., "*Coomunication Models For the Study of Mass Communication*", Longman Publishing, New York, 1993.
- Muis A., "Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa Menjangkau Era Cybercommu-nication milenium ketiga", Dharu Anuttama, Jakarta, 1999.
- Nimmo, "Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.
- Pareno S. A, "Manajemen Berita (Antara Idealisme dan Realita)", Papyrus, Surabaya, 2003.
- Prakoso, "Sikap Netralitas Pers terhadap Pemerintahan Habiebie (Analisis Isi Terhadap Kompas dan Republika)", dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, No. 3/April 1999, Remaja RosdaKarya, Bandung, 1999.
- Rachmah, Ida, "Metode Analisis Isi Mengukur Obyejtivitas Pers", (dalam Bungin Burhan, editor, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Rivers, William L dan Mathews, Cleve, (alih Bahasa Arwah Setiawan), "Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya", Gramedia, Jakarta, 1994.
- Siebert, Fred. S., Theodore P., Wilbur. S (alih bahasa Putu Laksman), "Empat Teori Pers, Intermedia", Jakarta, 1986.
- Sudibyoy, Agus., Ibnu Hamad., Muhammad Qadari, "Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa", Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 2001.
- Susanto S., "Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek", Remaja RosdaKarya, Bandung, 1995.